



PERTAHANAN NEGARA MELALUI KEBIJAKAN FESYEN: ANALISIS TERHADAP LARANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR DI INDONESIA

Farras Alifa Semendawai, Lukman Yudho Prakoso, Suwito

Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai impor pakaian bekas di Indonesia menyoroti beberapa isu krusial. Fokus utamanya adalah dampak terhadap industri tekstil lokal, termasuk persaingan tidak sehat dan risiko merugikan pertumbuhan sektor dalam negeri. Aspek regulasi dan penegakan hukum terkait impor pakaian bekas juga menjadi perhatian, terutama dalam mengatasi impor ilegal. Implikasi terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi menjadi fokus, dengan penelitian yang mendalam tentang perilaku konsumen terkait pakaian bekas, memahami dinamika pasar dan respon konsumen terhadap tren impor.

Dengan menggunakan metode studi literatur dan pendekatan teoretis mencakup kedaulatan ekonomi, mengeksplorasi sejauh mana negara dapat mencapai kedaulatan ekonomi dalam industri tekstil. Ketergantungan pada impor pakaian bekas memunculkan isu krusial tentang kedaulatan ekonomi dan dampak jangka panjangnya. Penelitian ini berpotensi memberikan solusi atau inovasi, baik dalam bentuk saran kebijakan, inisiatif industri, atau perubahan perilaku konsumen untuk mendukung perkembangan positif dalam sektor fesyen. Hasil pada penelitian ini menemukan penguatan pertahanan negara melalui kebijakan fesyen melibatkan aspek identitas dan industri dalam negeri. Langkah-langkah seperti pemilihan seragam militer, peningkatan produksi tekstil lokal, dan penggunaan simbol-simbol nasional dalam desain dapat meningkatkan efektivitas kebijakan ini. Dengan demikian, kebijakan fesyen dapat menjadi alat yang kuat dalam mendukung pertahanan negara, memperkuat kemandirian, dan membangun kesadaran akan peran fesyen dalam konteks pertahanan.

Kata Kunci: Ekonomi Pertahanan, Industri, Fesyen.

PENDAHULUAN

Penggunaan pakaian bekas telah menjadi favorit di kalangan masyarakat sebagai cara untuk memperoleh gaya yang unik dan berbeda dari yang lain. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan pakaian bekas memiliki merek terkemuka internasional dan model yang jarang ditemui di pasaran. Selain itu, daya tarik pakaian bekas juga terletak pada harganya yang terjangkau, memberikan alternatif hemat pengeluaran bagi konsumen. Pakaian bekas merujuk pada pakaian yang telah digunakan sebelumnya dan biasanya diimpor dari luar negeri, seperti Singapura, Malaysia, dan Korea (Syafrizal, S., & Karimah, N. U., 2014).

Berdasarkan data BPS, terjadi fluktuasi dalam jumlah impor pakaian bekas selama satu dekade terakhir di Indonesia. Pada tahun 2022, impor pakaian bekas mencapai 26,22-ton dengan nilai US\$272.146, yang mengalami peningkatan signifikan sebesar 230,40% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun sebenarnya impor pakaian bekas tidak diperbolehkan menurut regulasi dalam Permendag Nomor 40/2022, data menunjukkan bahwa impor tersebut tetap berlangsung dari berbagai negara, termasuk Jepang, Australia, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong. Jepang menjadi penyumbang impor terbanyak dengan 12-ton senilai US\$24.478, diikuti oleh Australia dengan 10,02-ton senilai US\$225.941.

Situasi ini memberikan pemahaman bahwa meskipun adanya regulasi yang melarang impor pakaian bekas, tetapi kenyataannya impor tersebut masih terjadi. Berdasarkan penelitian (Amelia, et al., 2023) terkait peningkatan daya saing antara industri pakaian dan pakaian *thrifting*, faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing dalam kasus ini yaitu kualitas produk, efisiensi produksi, teknologi, inovasi, pemasaran, *branding*, dan kolaborasi.

Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pakaian bekas (*thrifting*) merupakan sebuah masalah yang dapat berdampak negatif pada industri pakaian lokal karena produk-produk baju bekas memiliki keunggulan daya saing dalam hal kualitas produk, *branding*, dan harga. Maka dari itu, dalam penelitian ini, peranan pemerintah diperlukan dalam pengadaan regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan industri fesyen lokal. Perubahan regulasi atau penegakan hukum mungkin diperlukan untuk mengatasi tantangan dan melihat jumlah impor yang signifikan.

Berdasarkan penelitian milik Muiz, A. N., Fajar, W. L., & Rahayu, R. (2023), pakaian bekas impor di Indonesia dianggap ilegal karena bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, pakaian bekas impor dianggap berpotensi menjadi barang berbahaya karena dapat beredar secara bebas tanpa adanya pengecekan terlebih dahulu. Dalam penelitian oleh Dewi, N. M. I. K., Widiati, I. A. P., & Utama, I. N. (2020), ditekankan bahwa tidak semua pakaian bekas impor memiliki kualitas yang dapat dijamin.

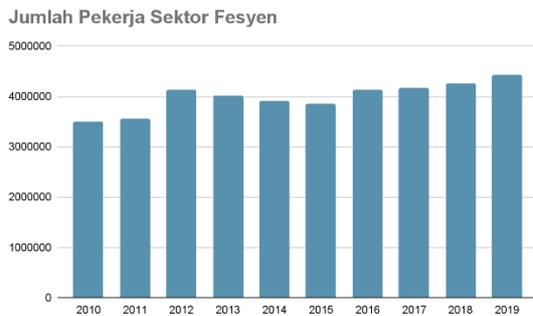
Sementara itu, penting untuk dicatat bahwa ekspor dan impor memiliki peran signifikan dalam konteks perdagangan internasional, memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ekspor berperan sebagai sumber devisa yang penting, sementara impor memungkinkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat diproduksi secara lokal, dengan dampak terjangkau dari segi biaya (Mogi, A., & Lativa, L., 2023).

Tetapi disisi lain, baju bekas impor juga memberikan dampak positif bagi para penjual pakaian bekas atau *thrifting*, hal tersebut dapat dilihat dengan ramainya masyarakat yang berbelanja pada pasar Senen dan pasar Gedebage yang terkenal sebagai pusat jual beli baju bekas. Walaupun semenjak

kebijakan larangan impor pakaian bekas pasar Gedebage sempat terdampak dengan banyaknya toko yang tutup.

Industri fesyen Indonesia berdasarkan data Kemenparekraf jumlah penduduk yang bekerja pada sektor kreatif pada tahun 2019 sebanyak 4,4 juta jiwa.

Jumlah Pekerja Sektor Fesyen di Indonesia



Sumber: Data Statistik Ekonomi Kreatif 2020

Jumlah pekerja pada sektor fesyen mengalami kenaikan dan penurunan tetapi dari tahun 2017 hingga 2019 jumlah pekerja di sektor fesyen terus meningkat. Hal tersebut membuktikan bahwa sektor fesyen merupakan sektor yang cukup besar dan juga diminati oleh kalangan pekerja. Dengan adanya impor pakaian bekas yang dapat mengancam industri fesyen, hal tersebut dapat memberikan dampak secara langsung terhadap para pekerja di sektor fesyen itu sendiri. Yang mana dapat berpengaruh pada perekonomian masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi literatur terkait kebijakan pemerintah terhadap industri fesyen dalam menghadapi impor pakaian bekas di Indonesia. Peneliti melihat kebijakan tentang pakaian impor dan industri fesyen yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan suatu langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menjaga ketahanan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Tinjauan literatur, baik kualitatif melalui naratif atau literatur sistematis, membantu membentuk kerangka pemikiran penelitian, sesuai dengan metode yang dijelaskan oleh Kurnia, R. R., Saputro, G. E., & Murtiana, S. (2023). Literature review memiliki peran kunci dalam studi organisasi, berkontribusi pada pengembangan dan evaluasi teori, survei pengetahuan, identifikasi masalah, dan memberikan akun historis tentang perkembangan topik. Dengan fokus pada studi literatur, penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam ke dalam bidang pengetahuan yang relevan. Berdasarkan penelitian milik Anderson, M. H., & Lemken, R. K. (2023), sebelum melakukan tinjauan literatur, penting menetapkan pertanyaan-pertanyaan sentral sesuai penelitian sebelumnya. Analisis konteks kutipan, umumnya fokus pada cara karya-karya tertentu dikutip dalam literatur baru, khususnya buku atau artikel klasik. Secara keseluruhan, studi literatur tidak hanya menggambarkan status pengetahuan, tetapi juga membantu mengarahkan arah penelitian mendatang. Secara keseluruhan, studi literatur tidak hanya menggambarkan status pengetahuan dalam suatu bidang, tetapi juga memberikan pandangan yang mendalam dan kritis untuk mengarahkan arah penelitian masa depan.

Penelitian ini menggunakan metodologi studi literatur untuk menggali informasi terkait industri fesyen dan kebijakan pemerintah terkait impor pakaian bekas di Indonesia. Pencarian dilaksanakan pada bulan Desember 2023 dengan menggunakan kata kunci yang diidentifikasi melalui *Google Scholar* dan literatur *online* lainnya. Daftar referensi dari setiap artikel yang dimasukkan dicari secara

manual guna mengidentifikasi artikel yang memiliki potensi memenuhi kriteria. Judul dan abstrak dari catatan yang pertama kali diambil disaring untuk mengeliminasi artikel yang terbukti tidak relevan. Teks lengkap dari makalah yang memiliki potensi relevan kemudian diperiksa lebih lanjut untuk menilai kelayakannya (Smela, B., Toumi, M., Świerk, K., Francois, C., Biernikiewicz, M., Clay, E., & Boyer, L., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi Pertahanan

Ekonomi pertahanan adalah bidang ekonomi penting yang berkembang, namun berbeda dari bidang ekonomi murni. Meskipun memberikan kontribusi penting, ekonomi bukan pemain intelektual utama dalam studi pertahanan; fokus utama terletak pada hubungan internasional dan ilmu politik (Sandler, T., & Hartley, K., 2007). Selain itu, gagasan pendukung lainnya dikemukakan oleh McGuire, M. C. (1995) yang menjelaskan bahwa ekonomi pertahanan memiliki keterkaitan yang kompleks dengan berbagai isu yang harus dihadapi oleh setiap negara dalam mencapai keamanan nasional. Dengan memanfaatkan konsep dan metode ekonomi, bidang ini bertujuan mengevaluasi pertanyaan-pertanyaan seputar keamanan dan memahami bagaimana keamanan suatu negara berinteraksi dengan keamanan negara-negara lain dalam konteks sistem internasional. Peneliti menafsirkan bahwa ekonomi pertahanan bukan hanya melibatkan aspek ekonomi, tetapi juga berhubungan dengan dinamika keamanan global yang kompleks dan keterkaitan antara negara-negara dalam sistem internasional.

Berdasarkan prosiding atau dokumen hasil dari Konferensi Manajemen Internasional ke-16 milik CREȚU, R. F., CĂLIN, A. M., GOMBOȘ, C. C., & BURLACU, S (2022) yang membahas

gagasan terkait dengan ketahanan ekonomi (*resilience*) dan faktor-faktor yang terlibat, termasuk diversifikasi ekonomi dan kemampuan untuk meredam dampak guncangan. Konsep ini mencerminkan preferensi untuk stabilitas makroekonomi di tingkat regional. Penelitian menunjukkan bahwa data kinerja ekonomi suatu wilayah dapat mengindikasikan tingkat ketahanan ekonomi, termasuk kemampuan wilayah tersebut untuk pulih setelah mengalami guncangan.

Hubungannya dengan kebijakan pemerintah terhadap industri fesyen di Indonesia dapat dilihat dalam upaya untuk menciptakan ketahanan ekonomi dalam menghadapi impor pakaian bekas. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah dapat mencakup diversifikasi industri fesyen lokal, pengurangan ketergantungan pada impor, dan langkah-langkah untuk meredam dampak guncangan ekonomi, seperti melalui insentif ekonomi dan perlindungan terhadap industri dalam negeri. Dengan menerapkan konsep ketahanan ekonomi, pemerintah dapat memperkuat industri fesyen domestik dan meningkatkan daya saingnya dalam menghadapi tantangan impor.

Selanjutnya, penelitian milik Verdone, F., Cantarero, S., & Puig, F. (2021) membahas inovasi terkini dan ekspansi perusahaan tekstil di Spanyol, khususnya dalam bidang tekstil sanitasi dan digitalisasi. Dalam konteks krisis global akibat COVID-19, penelitian ini mengeksplorasi tantangan dan ketahanan industri tekstil Spanyol melalui perspektif perusahaan, hubungan, dan institusi.

Dari segi ekonomi pertahanan, jika kita menghubungkannya dengan kebijakan pemerintah terhadap industri fesyen dalam menghadapi impor pakaian bekas di Indonesia, dapat diidentifikasi beberapa poin relevan. Pertama, perusahaan tekstil Spanyol terlibat aktif dalam konteks lokal mereka,

menciptakan lebih banyak perekonomian eksternal. Hal ini sejalan dengan pendekatan ekonomi pertahanan yang mendorong kemandirian ekonomi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Kedua, dukungan dari institusi, seperti asosiasi dan pemerintah daerah, dianggap sebagai faktor penting dalam memastikan kelangsungan industri. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendukung industri fesyen domestik di Indonesia, terutama melalui regulasi dan kebijakan yang mendukung produksi dalam negeri dan melindungi industri dari dampak impor.

Kebijakan Fesyen Di Indonesia

Berdasarkan penelitian Chen, C., Sukarsono, F. M., & Wu, K. J. (2023), Standar hidup yang meningkat di Indonesia menyebabkan peningkatan limbah tekstil dari industri fesyen, menjadi masalah kritis yang perlu diatasi oleh pemerintah. Dari perspektif ekonomi, perdagangan pakaian bekas telah menghambat perkembangan industri tekstil dalam negeri dan berperan dalam menciptakan defisit perdagangan yang signifikan. Dampak sosial dan budaya perdagangan pakaian bekas di Kenya juga menjadi perhatian serius, karena adanya impor pakaian mengancam promosi gaya lokal. Selain itu, negara ini saat ini menghadapi peningkatan tingkat polusi lingkungan, terutama polusi plastik, yang berasal dari kontribusi pakaian impor.

Selanjutnya, penelitian yang membahas mengenai "*Defense Policy and Strategy*" tidak secara langsung membahas mengenai peningkatan kepentingan kebijakan fesyen dalam pertahanan negara. Namun, kita dapat melihat keterkaitan antara konsep strategi yang dibahas dalam penelitian tersebut dan kebijakan fesyen dalam konteks pertahanan negara. Dalam

penjelasannya, strategi didefinisikan sebagai suatu pendekatan untuk mencapai tujuan kebijakan, dan penekanannya pada "penggunaan instrumen kekuatan nasional secara bersama-sama dan terpadu untuk mencapai tujuan" mencerminkan pentingnya koordinasi dan integrasi dalam mencapai suatu sasaran. Jika diterapkan pada lingkup kebijakan fesyen dalam pertahanan negara, strategi dalam hal ini dapat mencakup pendekatan terkoordinasi untuk mengelola industri fesyen domestik dengan tujuan memperkuat ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada impor pakaian bekas. Oleh karena itu, meskipun penjelasan tersebut tidak secara langsung membahas kebijakan fesyen, konsep strategi yang dijelaskan dapat dihubungkan dengan bagaimana suatu negara menerapkan kebijakan fesyen sebagai bagian dari strategi pertahanan negara yang lebih luas.

Peran fesyen dalam identitas dan pertahanan negara pada penelitian milik Subramanian, L. (2018), membahas bagaimana fesyen dapat berperan sebagai alat untuk membangun identitas nasional. Subramanian mengulas elemen-elemen fesyen, seperti pakaian tradisional atau motif tertentu, dapat digunakan untuk mengkomunikasikan identitas kultural dan nasional. Dalam konteks pertahanan negara, pemahaman dan penguatan identitas nasional melalui fesyen dapat menjadi faktor yang mendukung kesatuan dan kebanggaan nasional, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pertahanan negara.

Dalam buku "*Globalization: Social Theory and Global Culture*" dan "*Globalisation, Culture and Higher Education*" menjelaskan akan pengaruh globalisasi terhadap berbagai aspek budaya, termasuk industri fesyen. Globalisasi dapat mempercepat pertukaran ide dan tren fesyen di seluruh

dunia. Dalam hal industri fesyen, ini bisa berarti penyebaran gaya dan desain secara global. Pengaruh globalisasi terhadap industri fesyen dapat memiliki dampak signifikan pada ekonomi dan kebijakan fesyen di tingkat nasional.

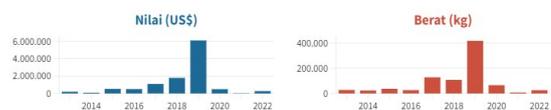
Di Indonesia sendiri, pemerintah telah menetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, pada Pasal 3 salah satu fokus utamanya yaitu perindustrian dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional dan membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pemerintah mendukung perkembangan industri nasional dengan Dengan mengidentifikasi industri sebagai elemen kunci dalam struktur ekonomi, pasal ini menegaskan kontribusi strategis yang diharapkan dari sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, pasal tersebut juga menandakan pentingnya membuka peluang berusaha dengan memajukan sektor industri, menciptakan lingkungan yang mendukung inisiatif dan kreativitas. Di samping itu, tujuan lainnya adalah perluasan kesempatan kerja, yang mencerminkan kesadaran akan dampak positif yang dapat dihasilkan oleh pertumbuhan sektor industri terhadap penurunan tingkat pengangguran. Dengan demikian, Pasal 3 tersebut mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia dalam mengarahkan dan mendukung perkembangan sektor industri sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional.

Kemudian, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang pakaian bekas tertera pada Pasal 2 Ayat (3) "Barang Dilarang Impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas". Barang bekas yang tercantum dalam

aturan tersebut dilarang impor karena akan memberikan dampak negatif bagi ekonomi lokal, terlebih bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan dapat memberikan efek yang buruk bagi kesehatan pengguna pakaian bekas. Adanya larangan impor pakaian bekas di Indonesia ini telah diberlakukan dan bagi pelanggar akan dikenai sanksi yang sesuai pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp. 5 Milyar.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa dari tahun 2013 hingga 2022, Indonesia telah mendatangkan 870,4-ton pakaian bekas dari luar negeri, dengan total nilai mencapai US\$11,09 juta. Pakaian bekas impor ini berasal dari 92 negara yang berbeda.

Impor Baju Bekas 2013-2022
Sumber: Tempo.co dari BPS (Badan Pusat



Statistik), 2023

Secara tahunan, terlihat adanya peningkatan yang cukup mencolok dalam impor pakaian bekas, dimulai dari tahun 2017. Pada tahun tersebut, volume impor mencapai 128,5 ton, mengalami kenaikan hampir enam kali lipat dibandingkan dengan tahun 2016. Tren ini mencapai puncaknya pada tahun 2019, di mana volume impor mencapai 417,7-ton dengan nilai lebih dari US\$6 juta. Fakta ini menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam kebijakan impor atau permintaan pasar terkait pakaian bekas di Indonesia.

Berdasarkan pengamatan peneliti pada beberapa *online shop* dan beberapa media sosial seperti Shopee dan Instagram, bahwa pasar pakaian bekas masih banyak digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Terbukti semakin

banyaknya pedagang-pedagang baru di *online shop* dan media sosial dalam lingkup penjualan pakaian bekas, walaupun *trend* yang sudah berpindah ke penjualan sepatu bekas. Tetapi, banyaknya barang-barang yang dijual tersebut adalah barang bekas yang berasal dari luar negeri baik Asia maupun Eropa. Menariknya, walaupun pakaian bekas impor di Indonesia tidak diperbolehkan lagi namun masih banyak yang melanggarnya.

Disisi lain, kegagalan proyek industri pakaian di Afrika, khususnya melalui kisah kelim Zambia China Mulungushi Textiles dalam Brooks, A. (2019). Pabrik ini menjadi simbol kegagalan upaya industrialisasi di Afrika, mencerminkan kesulitan yang melanda upaya modernisasi ekonomi dan sosial di benua itu. Sementara peran Afrika dalam produksi dan konsumsi pakaian terbatas dan kurang mendapat perhatian, kenaikan cepat Beijing sebagai pusat kekuatan global mempengaruhi secara signifikan sektor pakaian di seluruh Afrika. Brooks menyoroti peran penting China sebagai pasar terbesar untuk kapas Afrika dan dampaknya terhadap ekonomi Afrika, sementara jejak kolonialisme Eropa masih memberikan tantangan terhadap perkembangan ekonomi di sektor garmen. Di sisi lain, keberhasilan China dalam membentuk sektor pakaian dan tekstil terbesar di dunia mencerminkan transformasi ekonomi yang monumental selama empat dekade terakhir, dengan pengaruh global yang semakin meningkat.

Pemerintah di berbagai negara di Afrika dipaksa untuk mengadopsi model ekonomi berbasis perekonomian pasar bebas neoliberal. Dalam model neoliberal ini, perkembangan industri dianggap hanya mungkin terjadi dengan mengurangi kontrol negara dan liberalisasi pasar. Namun, dalam kenyataannya, perubahan struktural ini

justru merugikan sebagian besar produsen pakaian di Afrika, karena pemerintah tidak lagi dapat melindungi pabrik tekstil dan, akibatnya, pasar lokal menyusut.

Sebagai contoh, di Afrika Selatan, industri pakaian mengalami penurunan karena para pengecer lokal memanfaatkan liberalisasi pasar di bawah pemerintahan ANC setelah tahun 1994 dan mendapatkan pakaian dari produsen Tiongkok dan Asia lainnya. Di Kenya, produsen pakaian menghadapi pasar yang lemah di kota-kota akibat penurunan pendapatan perkotaan. Di seluruh Afrika, permintaan yang berkurang untuk pakaian baru yang diproduksi secara lokal pada tahun 1990-an dikombinasikan dengan persaingan dari pakaian baru yang lebih terjangkau, tetapi juga, yang lebih penting, pakaian bekas.

Afrika Sub-Sahara menjadi salah satu pasar utama untuk impor pakaian bekas pada tahun 1980-an. Pada periode tersebut, industri pakaian domestik yang lemah kehilangan perlindungan dengan diberlakukannya liberalisasi ekonomi melalui program penyesuaian struktural yang disponsori oleh IMF dan Bank Dunia. Industri mengalami stagnasi atau penurunan, sehingga pakaian bekas diizinkan masuk ke pasar yang direformasi. Sektor pakaian kecil menghadapi banyak sekali masalah karena dampak sosio-ekonomi yang lebih luas. Seiring dengan penurunan pendapatan, impor pakaian bekas yang murah memberikan pengentasan dari inflasi harga bagi masyarakat miskin.

Pakaian bekas yang diimpor, bersama dengan pakaian baru yang lebih murah dan tekstil dari Asia Timur, mengalahkan barang-barang yang diproduksi lokal, sementara pabrik-pabrik tutup di seluruh benua. Uang yang sebelumnya dihabiskan untuk barang-barang yang diproduksi di dalam negeri dialihkan untuk membeli pakaian impor,

dan keuntungan mengalir keluar dari ekonomi Afrika ke eksportir komersial dan amal di Dunia Utara serta produsen di Tiongkok dan Asia lainnya.

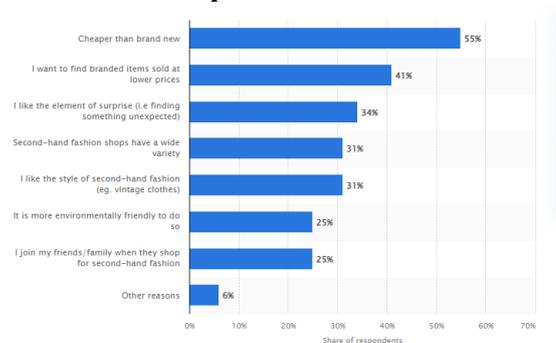
Pentingnya perdagangan pakaian bekas terlihat di sebagian besar Afrika ternyata membawa dampak ekonomi dan sosial yang signifikan di seluruh benua, dengan berbagai kelompok, seperti pedagang pakaian bekas, pekerja tekstil, dan konsumen yang miskin, memiliki pengalaman yang berbeda. Meskipun beberapa kelompok, seperti pedagang jalanan informal, mungkin mendapatkan keuntungan, dampak perdagangan pakaian bekas juga terlihat dalam penurunan kemungkinan pengembangan industri pakaian modern di Afrika. Perdagangan pakaian bekas di Afrika diperkuat oleh fakta bahwa permintaan melebihi pasokan, dan penjual Amerika dan Eropa selalu mencari pasar terbaik, mengubah jalur perdagangan. Tekstil bekas yang diperdagangkan di seluruh benua ini membentuk suatu sistem pasokan yang dinamis, dengan berbagai pihak yang terlibat, termasuk badan amal, perusahaan, dan pedagang, yang menyesuaikan diri dengan kondisi dan perubahan dalam industri serta regulasi impor. Perdagangan pakaian bekas di Afrika tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi konvensional, tetapi juga oleh dinamika budaya, sejarah, dan jaringan hubungan yang kompleks antara berbagai pemangku kepentingan dalam rantai pasokan. Pakaian bekas bukanlah hal yang eksklusif ditemukan di negara-negara Afrika yang kurang berkembang; melainkan dijual secara global. Tren fesyen vintage sedang meningkat di seluruh dunia utara, dan studi kasus dari pusat mode terkemuka seperti London, New York, dan Tokyo menyoroiti hubungan sektor pakaian retro dan vintage dengan industri fesyen yang sedang berkembang.

Bukti lebih lanjut menunjukkan bahwa perdagangan pakaian bekas

terkait dengan kegiatan ekonomi yang menyimpang dan melanjutkan koneksi jangka panjang dengan tindak kriminal. Karena penyelundupan yang meluas, pemodelan ekonomi yang akurat terhadap efek dari perdagangan yang tidak terdokumentasi menjadi sangat bermasalah, yang berkontribusi pada kesulitan menilai dampak penuh impor pakaian bekas terhadap penurunan industri pakaian di Afrika.

Dua risiko utama dalam perdagangan pakaian bekas adalah fluktuasi mata uang dan kualitas pakaian yang buruk. Risiko terhadap keuntungan berpindah dari pedagang grosir ke pedagang pasar, yang mencerminkan kekuasaan tersebut hubungan dalam sistem penyediaan ini. Inflasi harga merupakan penyebab umum keluhan, namun tantangan terbesarnya adalah kualitas stok yang buruk. Pakaian bekas pada dasarnya bervariasi; ada yang bersih dan seperti baru, ada pula yang compang-camping dan sudah rusak.

Motivasi Utama Berbelanja Pakaian Bekas di Indonesia pada Bulan Mei 2022



Sumber: Statista, 2023

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Statista bahwa motivasi yang paling umum untuk membeli pakaian bekas adalah harganya yang lebih terjangkau dibandingkan dengan barang baru. Sementara itu, 25 persen responden menyatakan bahwa mereka memilih pakaian bekas karena lebih ramah lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian oleh Dharma, I. K. W. (2023) menyampaikan bahwa pakaian bekas

impor berdampak negatif terhadap merek-merek fesyen lokal, dengan banyak konsumen yang beralih dari pembelian produk lokal ke pakaian bekas impor. Data dari *Center for Indonesian Policy Studies* (CIPS) dan Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa industri fesyen lokal kehilangan pangsa pasar seiring dengan popularitas tren *thrifting* di Indonesia. Dengan demikian, pakaian bekas impor dapat diidentifikasi sebagai penyebab pergeseran perilaku konsumen dan penurunan dukungan terhadap merek-merek lokal.

Berdasarkan *Apparel Resources* (2023), Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Afrika dalam menanggulangi permasalahan akibat impor pakaian bekas yaitu, *African Continental Free Trade Area* (ACFTA) telah mengadopsi protokol yang bertujuan untuk melarang perdagangan pakaian bekas di seluruh benua Afrika. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk memajukan industrialisasi dan menambah nilai di sektor tekstil di wilayah tersebut. Protokol tersebut mencerminkan upaya untuk mengurangi impor pakaian bekas dan mendorong perkembangan industri tekstil lokal. Di Indonesia sendiri berdasarkan Liputan6, 2023, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah mengambil langkah tegas dengan menerapkan kebijakan pelarangan impor pakaian bekas. Keputusan ini diambil karena adanya keprihatinan terhadap dampak negatifnya terhadap industri tekstil dalam negeri, yang dapat mengganggu pertumbuhan sektor tersebut. Selain itu, alasan lainnya mencakup kekhawatiran akan masalah kebersihan yang dapat mengakibatkan infeksi kulit dan penyakit, serta potensi kerugian bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Langkah ini sejalan dengan upaya untuk mendukung pertumbuhan

industri tekstil lokal dan melindungi kesehatan masyarakat.

Pemerintah perlu segera mengambil tindakan yang efektif terhadap masalah pakaian bekas yang semakin merugikan industri fesyen lokal. Langkah pertama yang dapat diambil adalah memperkuat pengawasan dan keamanan di pelabuhan Indonesia untuk menghentikan masuknya pakaian bekas secara ilegal. Diperlukan pula regulasi impor yang lebih ketat, termasuk penetapan titik masuk resmi yang diotorisasi. Selain itu, pemerintah harus memberikan dukungan langsung kepada pelaku usaha kecil dan menengah (SMEs) dalam industri fesyen lokal, seperti subsidi biaya produksi atau insentif pajak. Edukasi konsumen juga menjadi kunci, dengan kampanye yang meningkatkan kesadaran akan dampak negatif pakaian bekas terhadap industri lokal. Kolaborasi erat dengan pelaku industri lokal dapat membantu menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri sambil meminimalkan dampak negatif pakaian bekas. Pemerintah juga perlu mendorong praktik-produksi ramah lingkungan di industri fesyen lokal dan fokus pada keberlanjutan untuk membangun citra merek yang peduli terhadap lingkungan.

Dalam konteks fenomena pakaian bekas, aspek ekonomi pertahanan di Indonesia memerlukan regulasi yang dapat mengarahkan industri fesyen menuju pertumbuhan yang berkelanjutan, sekaligus mendukung kepentingan pertahanan negara. Perlu adanya regulasi yang mendukung produksi tekstil dan pakaian dalam negeri, sehingga industri fesyen lokal dapat berkembang dan bersaing secara sehat. Selain itu, langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungan pada impor pakaian bekas perlu diterapkan, mungkin melalui insentif dan dukungan pemerintah terhadap industri fesyen lokal.

Regulasi ini dapat mencakup pembatasan impor pakaian bekas yang dapat menghambat pertumbuhan industri tekstil dalam negeri. Dukungan pemerintah juga bisa diberikan dalam bentuk insentif pajak atau fasilitas lainnya untuk produsen lokal, sehingga mereka dapat bersaing dengan harga yang ditawarkan oleh pakaian bekas impor. Selain itu, menggalakkan kampanye "beli produk dalam negeri" dapat menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan produk-produk fesyen lokal.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, regulasi terkait industri fesyen di Indonesia dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi pertahanan melalui penguatan industri tekstil dan fesyen lokal. Langkah-langkah ini sekaligus dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, meningkatkan kemandirian ekonomi, dan mempromosikan identitas nasional melalui produk fesyen yang berkualitas dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Penguatan pertahanan negara melalui kebijakan fesyen merupakan aspek yang terkait erat dengan identitas dan industri dalam negeri. Kebijakan fesyen dapat mencakup pemilihan seragam militer, peningkatan produksi tekstil lokal, dan penggunaan simbol-simbol nasional dalam desain. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini, langkah-langkah seperti pemantapan industri tekstil dalam negeri, kolaborasi dengan desainer lokal untuk menciptakan identitas nasional, dan upaya edukasi masyarakat perlu diimplementasikan. Dengan demikian, kebijakan fesyen dapat menjadi alat yang kuat dalam mendukung pertahanan negara, memperkuat kemandirian, dan membangun kesadaran akan peran fesyen dalam konteks pertahanan.

DAFTAR PUSTAKA

Amelia, A., Permatasari, E., Sinaga, F., & Antoni, H. (2023). Peningkatan Daya Saing Industri terhadap Kasus Impor Pakaian Bekas (Trifting). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 1759-1764.

Anderson, M. H., & Lemken, R. K. (2023). Citation context analysis as a method for conducting rigorous and impactful literature reviews. *Organizational Research Methods*, 26(1), 77-106.

Apparel Resources News-Desk. (2023, July 17). Africa bans trade in second-hand clothes across continent | Trade Data News Africa. Apparel Resources. Retrieved December 28, 2023, from <https://apparelresources.com/business-news/trade/africa-bans-trade-second-hand-clothes-across-continent/>

Brooks, A. (2019). *Clothing poverty: The hidden world of fast fashion and second-hand clothes*. Bloomsbury Publishing.

Chen, C. C., Sukarsono, F. M., & Wu, K. J. (2023). Evaluating a sustainable circular economy model for the Indonesian fashion industry under uncertainties: A hybrid decision-making approach. *Journal of Industrial and Production Engineering*, 40(3), 188-204.

CRETU, R. F., CĂLIN, A. M., GOMBOȘ, C. C., & BURLACU, S. (2022). ECONOMIC RESILIENCE AND TERRITORIAL PROFILE ADMINISTRATION. http://conference.management.ase.ro/archives/2022/pdf_IMC_2022/4_7.pdf

Dharma, I. K. W. (2023). The Factors that Influence Generation Z's Purchase Intention Towards Imported Secondhand Clothes In Indonesia. *Journal Integration of Management Studies*, 1(2), 136-145.

Durmasema, A. R., Pratama, A. Y. N., & Rendisky, J. H. (2020). STATISTIK EKONOMI KREATIF 2020 CREATIVE ECONOMIC STATISTICS OF 2020 (1st ed.). Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. https://api2.kemendparekraf.go.id/storage/app/resources/Statistik_Ekraf_2021_rev01_isbn_3d826fedcb.pdf

Grehenson, G. (2023, March 27). Pelarangan Impor Baju Bekas Harus Diikuti Peningkatan Kualitas Produk Lokal. Universitas

Gadjah Mada. Retrieved December 28, 2023, from <https://ugm.ac.id/id/berita/23595-pelarangan-impor-baju-bekas-harus-diikuti-peningkatan-kualitas-produk-lokal/>

Kurnia, R. R., Saputro, G. E., & Murtiana, S. (2023). Management of human resources in national defense depend on defense economics point of view. *International Journal on Social Science, Economics and Art*, 13(1), 1-11.

McGuire, M. C. (1995). Defense economics and international security. *Handbook of Defense Economics*, 1, 13-43.

Neill, M., Taliaferro, A. C., Tillman, M. E., Morgan, G. D., & Hinkle, W. P. (2017). Defense Governance and Management: Improving the Defense Management Capabilities of Foreign Defense Institutions.

Nurhanisah, Y. (2023, Maret). Impor Pakaian Bekas, Boleh Gak Sih? | Indonesia Baik. *Indonesiabaik*. Retrieved December 28, 2023, from <https://indonesiabaik.id/infografis/impor-pakaian-bekas-boleh-gak-sih>

Nurhayati-Wolff, H. (2023, February 15). Indonesia: reasons for shopping second-hand fashion 2022. *Statista*. Retrieved December 28, 2023, from <https://www.statista.com/statistics/1366444/indonesia-reasons-for-shopping-second-hand-fashion/>

RITONGA, M. W. (2023, March 21). Ribuan Kios di Pasar Gedebage Tutup Pascalarangan Impor Baju Bekas. *Kompas.id*. Retrieved December 28, 2023, from <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/03/21/ribuan-kios-di-pasar-gedebage-tutup-pasca-larangan-impor-baju-bekas>

Robertson, R. (1992). Globalization: Social theory and global culture. *Globalization*, 1-224.

Robertson, R. (2007). globalization, culture and. *The Blackwell encyclopedia of sociology*, 4, 1964-1970.

Rony, T. K. (2023, March 20). No More Thrifting? Indonesia Slays The Imports of Secondhand Fashion. *Liputan6.com*. Retrieved December 28, 2023, from <https://www.liputan6.com/global/read/5238563/no-more-thrifting-indonesia-slays-the-imports-of-secondhand-fashion?page=2>

Sandler, T., & Hartley, K. (Eds.). (2007). *Handbook of Defense Economics: Defense in a globalized world*. Elsevier.

Smela, B., Toumi, M., Świerk, K., Francois, C., Biernikiewicz, M., Clay, E., & Boyer, L. (2023). Rapid literature review: definition and methodology. *Journal of Market Access & Health Policy*, 11(1), 2241234

Subramanian, L. (2018). Cloth and commerce: understanding Indian economic history. *Textile Trades, Consumer Cultures, and the Material Worlds of the Indian Ocean: An Ocean of Cloth*, 55-77.

Sutedjo, V. (2023, April 13). Importing Used Clothes in Indonesia, What is the Legality? *Hukumonline*. Retrieved December 28, 2023, from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/importing-used-clothes-in-indonesia-what-is-the-legality--lt6437e7eb9233e>

Syafrizal, S., & Karimah, N. U. (2014). *Motivasi Masyarakat Membeli Pakaian Bekas di Pasar Senapelan Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Riau University).

Verdone, F., Cantarero, S., & Puig, F. (2021). Capturing the Resilience of the Textile Companies as a Specific Response of the Fashion industry. *Firms in the Fashion Industry: Sustainability, Luxury and Communication in an International Context*, 141-161.